

BAB I PENDAHULUAN

I.1 KONDISI UMUM ORGANISASI

Bagian Hukum dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Bagian Hukum pada Biro HOH merupakan unsur penunjang Badan Standardisasi Nasional yang berkedudukan dibawah koordinasi Sekertaris Utama. Bagian Hukum mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN dalam menyediakan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Berdasarkan Pasal 25 Keputusan tersebut, Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum, perumusan dan penyusunan peraturan perundangan, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum.

LAKIP Bagian Hukum Tahun 2017 merupakan bentuk dokumen pertanggungjawaban berdasarkan pada Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Bagian Hukum ini disusun dengan memperhatikan berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang timbul dan mungkin akan timbul (deteksi dini) yang menyangkut kondisi internal dan eksternal baik regional, nasional maupun Internasional.

Selanjutnya dengan tersusunnya LAKIP Bagian Hukum, maka diharapkan dapat :

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Bagian Hukum.
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama baik dengan unit eselon III lingkup kesestamaan maupun seluruh unit kerja yang ada dilingkungan BSN. Sehingga kerjasama dengan manajemen kinerja berjalan dengan

sebagaimana yang diharapkan, mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja hingga evaluasi kinerja.

3. Menyelenggarakan tugas - tugas pemerintahan dengan baik dan benar serta transparan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

A. KELEMBAGAAN

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Bagian Hukum. Kelembagaan menyangkut aspek tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

A.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bagian

Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi, serta organisasi Bagian Hukum Biro HOH BSN adalah sebagai berikut.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis, pengkajian, penelaahan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi dan pemberian informasi hukum serta bantuan dan penyuluhan hukum.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisa dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum;
- c. pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi Perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan Hukum dan Perundang-undangan di bidang standardisasi.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN, struktur organisasi Biro HOH BSN terdiri dari :

Bagian Hukum Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis, pengkajian, penelaahan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi dan pemberian informasi hukum serta bantuan dan penyuluhan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisa dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum;
- c. pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi Perundang-undangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan Hukum dan Perundang-undangan di bidang standardisasi.

B. Sumber Daya Manusia Bagian Hukum Biro HOH BSN

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2017 Biro HOH BSN memiliki personel sebanyak 8 orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel B.1 Pegawai Bagian Hukum Biro HOH

No	Unit Kerja	Jumlah Orang
1.	Bagian Hukum	1
2.	Kepala Sub Bagian	2
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	3
4.	Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum	2
	Jumlah	8

Tabel B.1 Jenjang Pendidikan SDM Biro HOH

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1.	S2	2
2.	S1	6
	Jumlah	8

C. PERAN STRATEGIS BAGIAN HUKUM BIRO HOH BSN

Bagian Hukum pada Biro HOH sebagai unsur penunjang BSN mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, di bidang legislasi, kajian hukum, konsultasi dan bantuan hukum.

I.2 PERMASALAHAN UTAMA

Pada Tahun 2017 Bagian Hukum pada Biro Hukum Organisasi Humas menghadapi tantangan yang cukup besar dengan tidak tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan pada Penetapan kinerja Tahun 2017 antara lain :

1. Adanya kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 4/2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 sehingga pagu anggaran Biro HOH yang semula Rp. 13.239.344.000 menjadi Rp. 12.088.623.000 atau mengalami Efisiensi sebesar 9%
2. Belum ditetapkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menjadi Peraturan Pemerintah (PP). Hal ini disebabkan draft tersebut masih dalam proses pamarafan di Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelum dikirimkan kembali ke Menteri Sekretaris Negara untuk proses penetapan oleh Presiden RI.
3. Belum terselesaikannya struktur organisasi BSN yang baru sebagai Implementasi amanah UU No. 20 Tahun 2014. Saat ini masih dalam proses penyusunan draft struktur organisasi BSN yang baru dan pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
4. Belum selesainya rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kebijakan Nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Hal tersebut dikarenakan masih diperlukan pembahasan intensif di internal BSN sebelum diusulkan ke Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam upaya mencapai sasaran strategis Bagian Hukum pada Biro HOH BSN seperti yang tertera dalam Rencana Strategis periode 2015 - 2019, maka Bagian Hukum pada Biro HOH BSN menetapkan arah kebijakan strategis sebagai acuan langkah-langkah penyusunan target outcome program dan target output kegiatan.

II.2 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah penetapan kinerja Bagian Hukum Biro HOH BSN tahun 2017 berdasarkan sasaran yang telah disempurnakan untuk memenuhi perspektif *stakeholder* :

Tabel II.2 Penetapan Kinerja Bagian Hukum Biro HOH BSN Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
1.	Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK	1. Persentase peraturan perundang - undangan di bidang SPK yang ditetapkan	83%
		2. Jumlah produk hukum yang telah ditetapkan oleh Kepala BSN	500 Keputusan
		3. Jumlah kajian peraturan perundang - undangan yang diselesaikan	3 Kajian
2.	Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum	4. Persentase pemberian bantuan hukum	65%
		5. Jumlah Penyuluhan Hukum bidang SPK	7 Kali
		6. Persentase Peraturan Perundangan yang diunggah	78%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Bagian Hukum Biro HOH BSN menetapkan 2 (dua) sasaran yang telah disempurnakan dari sasaran sebelumnya, dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, Bagian Hukum Biro HOH BSN telah melaksanakan 2 (dua) program dengan 2 (dua) kegiatan.

Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Program Pengembangan Standardisasi Nasional, melalui kegiatan Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dilaksanakan melalui :

Penyusunan dokumen Peraturan Pemerintah (PP) di bidang standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yaitu PP tentang standardisasi dan PP tentang penilaian kesesuaian.

II. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN, melalui kegiatan:

Peningkatan Pelayanan Hukum, dilaksanakan melalui Pengelolaan Sistem Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum,

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Bagian Hukum pada Biro HOH BSN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

III.1 Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Bagian Hukum pada Biro HOH BSN, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja.

Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Penetapan Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Bagian Hukum Biro HOH BSN Tahun 2017

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
I	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian				
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas produk hukum	3. Jumlah peraturan perundang - undangan di bidang SPK	3 dokumen	3 dokumen	100%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
I	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian				
5.	Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK	17. Persentase peraturan perundang - undangan di bidang SPK yang ditetapkan	83%	91%	110%
18. Jumlah produk hukum yang telah ditetapkan oleh Kepala BSN		500 Keputusan	626	125%	
19. Jumlah kajian peraturan perundang - undangan yang diselesaikan		3 Kajian	5 kajian	166%	
6.	Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum	20. Persentase pemberian bantuan hukum	65%	100%	154%
21. Jumlah Penyuluhan Hukum bidang SPK		7 Kali	7 Kali	100%	
22. Persentase Peraturan Perundangan yang diunggah		78%	100%	128%	

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

TUJUAN :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai pendukung pelaksanaan pengembangan dan pembinaan standardisasi dan penilaian kesesuaian

Dalam mencapai tujuan tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum.
2. Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK
3. Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum.

Pencapaian dari tiap - tiap sasaran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum
----------------------	---

Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
c Jumlah peraturan perundang - undangan di bidang SPK	2 PP 2 RPerpres	3 dokumen	3 dokumen	100%

Tahun 2017 pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum ada 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan. Dan disatu indikator tersebut ada 3 (tiga) target capaian yaitu ditetapkannya RPP tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Rperpres tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Standardisasi Nasional, Rpermenristekdikti tentang Kebijakan Nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Ketiga target capaian tersebut seharusnya menghasilkan PP tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Perpres tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Standardisasi Nasional, dan selesainya Rancangan Permenristekdikti tentang Kebijakan Nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Target tersebut tidak tercapai karena:

1. RPP tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian masih dalam proses pamarafan di Menteri Koordinator bidang Perekonomian.
2. RPerpres tentang Badan Standardisasi Nasional masih dalam proses penetapan Presiden
3. Rancangan Rpermen Ristek Dikti masih dibahas secara intensif di internal BSN.

Target capaian 3 (tiga) dokumen sampai akhir tahun 2017 tiga dokumen tersebut telah dapat disusun, namun masih terus dalam pembahasan dengan K/L dan unit kerja terkait. Secara dokumen, target sudah dapat tercapai, namun secara kualitas belum tercapai 100% karena masih dalam penyempurnaan. Kendala dari pencapaian kualitas capaian ini sebesar 80% dibandingkan Tahun 2016 sebelumnya capaian ini

mengalami peningkatan. Oleh karena itu langkah tindak lanjut yang akan dilakukan pada Tahun 2017 Bagian Hukum akan terus berupaya:

- a. Untuk percepatan terbitnya PP SSPKN , Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait proses paraf RPP tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- b. Untuk percepatan terbitnya Permen Ristekdikti, Bagian Hukum mengajukan permohonan Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017 untuk dimasukkan lagi dalam Program Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018. Dan
- c. Pembahasan di internal BSN untuk memperoleh kesepahaman substansi Rpermen ristekdikti tentang Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

SASARAN	Tersedianya peraturan perundangan-undangan dibidang SPK
5	

Tabel III.6 Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
17. Persentase peraturan perundang - undangan di bidang SPK yang ditetapkan	47%	83%	91%	110%
18. Jumlah produk hukum yang telah ditetapkan oleh Kepala BSN		500 Keputusan	626	125%
19. Jumlah kajian peraturan perundang -undangan yang diselesaikan	3 Kajian	3 Kajian	5 Kajian	166%
Persentase waktu penyelesaian SK Penetapan SNI	100%			

SASARAN 6	Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum
----------------------	--

Tabel III.7 Capaian Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Capaian 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
20. Persentase pemberian bantuan hukum	100%	65%	100	154%
21. Jumlah Penyuluhan Hukum bidang SPK	3 Kali	7 Kali	7 Kali	100%
22. Persentase Peraturan Perundangan yang diunggah	10%	78%	100%	128%

Tahun 2017 pencapaian sasaran Tersedianya peraturan perundang-undangan dibidang SPK indikator kerjanya belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2017 disebabkan karena :

- a) Adanya pencabutan permohonan penetapan Rancangan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional oleh unit pengusul;
- b) Kurangnya SDM Bagian Hukum;

Sehingga sampai dengan akhir Tahun 2017 pencapaian dari indikator kinerja diatas adalah sebesar 126,14% dari target penetapan 100%

Oleh karena itu Tahun 2018 Biro HOH khususnya bagian hukum sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja tersebut diatas akan dilakukan :

- 1) menerapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan BSN, terutama pembentukan Peraturan Kepala BSN.
- 2) Melakukan evaluasi dari hasil monitoring penyusunan Raperka BSN Tahun 2017 terhadap usulan Rperka BSN dari unit internal BSN.
- 3) Memonitor progres penyusunan Raperka BSN Tahun 2018 berdasarkan usulan unit pengusul Rperka BSN yang termasuk Program Penyusunan Perka BSN Tahun 2018 maupun yang diluar Program Penyusunan.
- 4) meningkatkan koordinasi dengan unit-unit kerja pengusul dalam menyelesaikan penyusunan Peraturan Kepala BSN yang diusulkan.

- 5) melakukan evaluasi akhir terhadap proses pembentukan Perka BSN pada tahun berjalan sebagai bahan pertimbangan penyusunan perencanaan pembentukan Perka BSN tahun berikutnya.

III.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun 2017 ini Bagian Hukum pada Biro HOH BSN didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016. Berdasarkan DIPA Nomor DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 14 Nopember 2016, pagu anggaran Bagian Hukum pada Biro HOH BSN sebesar Rp. 1.877.254.000,- dan realisasi anggaran Bagian Hukum pada Biro HOH BSN Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 1.798.674.626,- atau sebesar 95.81%.

Pagu dan realisasi anggaran Bagian Hukum pada Biro HOH BSN Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Biro HOH BSN TA. 2017

Dalam rupiah

No	Uraian	2017		
		Pagu	Realisasi	%
1	Bagian Hukum	1,877,254,000	1,798,674,626	95.81%
	a. Produk Hukum	422,201,000	397,738,000	
	b. Terwujudnya peraturan perundang - undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	1,455,053,000	1.400.936.626	

Perbandingan dengan Tahun 2016

No	Uraian	Realisasi	
		2016	2017
1	Bagian Hukum	4.115.492.352	1,798.674.626
	a. Produk Hukum	117.234.000	397.738.000
	b. Terwujudnya Peraturan perundang - undangan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	1.442.892.400	1.400.936.626

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Bagian Hukum pada Biro Hukum, Organisasi, dan Humas (HOH) BSN Tahun 2017 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bagian Hukum pada Biro HOH Tahun 2017 dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bagian Hukum pada Biro HOH BSN Tahun 2017, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja, telah dapat diselesaikan dari target yang ditetapkan. Terlaksananya seluruh kegiatan di Bagian Hukum pada Biro HOH BSN sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas fungsi Bagian Hukum pada Biro HOH BSN sebagai fasilitasi dan koordinasi.

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian kecil kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk perbaikan kegiatan Bagian Hukum pada Biro HOH BSN di tahun-tahun berikutnya.